

Franseda: Audit Dana BOS

■ Kepala Sekolah Sambut Baik

SINTANG, TRIBUN - Anggota DPRD Sintang, Franseda, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan inspektorat mengusut atau mengaudit kembali Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Desakan itu disampaikan Frans menyusul dugaanya tentang indikasi penggunaan dana BOS yang bermasalah.

"Berdasarkan temuan dan laporan yang saya dapat, ada beberapa sekolah yang menggunakan dana BOS kurang sesuai, khususnya sekolah-sekolah yang berada di daerah," ujar Frans, usai menerima perwakilan masyarakat Kayan Hilir yang mendesak dirinya mengajukan audit LPJ tersebut, Minggu (6/5).

Diungkapkannya, dalam laporan pertanggungjawaban setiap sekolah ada yang tidak memiliki program yang jelas. Seperti di Kecamatan Kayan Hilir, Dedai, Kelam Permai, dan di daerah-daerah pedalaman lainnya.

"Di sana buku pelajaran maupun buku referensi masih dibeli siswa sendiri. Sementara tujuan penggunaan dari dana BOS tersebut satu di antaranya, pengadaan buku-buku siswa untuk membantu kegiatan proses belajar agar siswa tidak lagi diberatkan," tukasnya.

Selain itu, kata Fran, dana BOS juga bisa digunakan sekolah untuk membiayai kegiatan-kegiatan seperti ekstrakurikuler, agar siswa memiliki keterampilan.

"Dalam laporan pertanggungjawabannya tidak ada



TRIBUN/IEH

” Dalam laporannya tidak ada dana yang tidak digunakan. Yang jadi pertanyaan, kegiatan apa yang sudah dibuat sekolah. ”

Franseda

Anggota DPRD Sintang

dana yang tidak digunakan. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, kegiatan apa yang sudah dibuat sekolah. Coba kita cek sendirilah di sekolah-sekolah pedalaman,” ujar Franseda.

Dukungan

Kepala Sekolah Dasar Negeri 5, Yamin, menyambut baik usulan Franseda. "Saya rasa apa yang dikatakan Pak Franseda sangat baik, dan perlu kita dukung," ujar Yamin.

Kepala SDN 13 Empaci, Kecamatan Dedai, Pardamean,

juga menyatakan tidak keberatan dengan desakan itu. Karena menurut dia, pihaknya dalam menggunakan dana BOS sudah sesuai prosedur.

"Kepala dinas sudah mengigatkan, agar tidak terlibat mengurus proyek-proyek sekolah. Karena sepenuhnya sudah diserahkan kepada komite sekolah masing-masing. Tugas kita hanya mengawasi dan mengajar siswa bukan mengurus proyek," tandas Padamean. (edh)